

**ANALISIS PEMBERDAYAAN PRAJURIT PEREMPUAN DALAM MISI
PERDAMAIAN DUNIA (STUDI KASUS SATUAN TUGAS BATALYON GERAK
CEPAT TNI KONTINGEN GARUDA XXXIX-C MONUSCO TA. 2021-2022)**

Eka Triastuti¹, Moch Afifuddin², Rudy Sutanto³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Email Korespodensi: eka.triastuti@gmail.com

Email: afifpnb@gmail.com; rudi.sutanto@gmail.com

ABSTRACT

The protracted conflict in the Democratic Republic of the Congo has prompted the involvement of the international community, including Indonesia, in United Nations peacekeeping operations through MONUSCO. As peacekeeping mandates increasingly emphasize a human security approach, the empowerment of female peacekeepers has become a strategic element in enhancing mission effectiveness, particularly in the protection of civilians, women, and children. This study aims to analyze the empowerment of female soldiers in international peacekeeping missions, using a case study of the Rapidly Deployable Battalion Task Force of the Indonesian National Armed Forces Garuda Contingent XXXIX-C MONUSCO during the 2021–2022 fiscal year. The research employs a qualitative method with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis involving informants from TNI leadership, the Indonesian Peacekeeping Mission Center, and female soldiers directly engaged in the mission. Data analysis was conducted through data condensation, data display, and conclusion drawing, guided by peace theory, women's empowerment concept, and optimization theory. The findings indicate that the empowerment of female soldiers was implemented through their involvement in operational duties, civil-military communication, and humanitarian activities. The presence of female peacekeepers significantly enhanced local community trust and improved the handling of gender-sensitive issues. However, challenges remain, including the limited number of female personnel, local cultural barriers, and the need for stronger gender-responsive policies and training. This study concludes that empowering female soldiers contributes significantly to the success of peacekeeping missions and should be continuously optimized through inclusive policies, capacity building, and sustained institutional support.

Keywords: women soldiers, empowerment, MONUSCO, Garuda Contingent

ABSTRAK

Konflik berkepanjangan di Republik Demokratik Kongo mendorong keterlibatan komunitas internasional, termasuk Indonesia, dalam misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui MONUSCO. Seiring berkembangnya mandat operasi perdamaian yang menekankan pendekatan human security, pemberdayaan prajurit perempuan menjadi elemen strategis dalam meningkatkan efektivitas misi, khususnya pada perlindungan masyarakat sipil, perempuan, dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberdayaan prajurit perempuan dalam misi perdamaian dunia dengan studi kasus Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat Tentara Nasional Indonesia Kontingen Garuda XXXIX-C MONUSCO Tahun Anggaran 2021–2022. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan dari unsur pimpinan TNI, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI, serta prajurit perempuan yang terlibat langsung dalam penugasan. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan landasan teori perdamaian, konsep pemberdayaan perempuan, dan teori optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan prajurit perempuan telah dilaksanakan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

144

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



melalui pelibatan dalam fungsi operasional, komunikasi sosial, dan kegiatan kemanusiaan. Kehadiran prajurit perempuan meningkatkan kepercayaan masyarakat lokal serta efektivitas penanganan isu sensitif berbasis gender. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jumlah personel perempuan, hambatan budaya lokal, serta kebutuhan penguatan kebijakan dan pelatihan berperspektif gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan prajurit perempuan berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan misi perdamaian dan perlu dioptimalkan secara berkelanjutan.

Kata kunci: prajurit perempuan, pemberdayaan, MONUSCO, Kontingen Garuda.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata di Republik Demokratik Kongo telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu konflik paling kompleks di Afrika. Eskalasi konflik sejak akhir 1990-an, yang dipicu oleh rivalitas etnis, perebutan kekuasaan politik, serta kepentingan atas sumber daya alam, melibatkan berbagai aktor domestik dan negara-negara kawasan. Dua perang besar, yakni Perang Kongo I (1996–1997) dan Perang Kongo II (1998–2003), meninggalkan dampak kemanusiaan yang luas, ditandai dengan jatuhnya jutaan korban jiwa dan tingginya angka pengungsian internal maupun lintas negara. Hingga saat ini, instabilitas keamanan masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan perdamaian di wilayah tersebut.

Dalam merespons konflik berkepanjangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk misi pemeliharaan perdamaian yang saat ini dikenal sebagai MONUSCO, sebagai kelanjutan dari misi sebelumnya, MONUC. MONUSCO memiliki mandat yang lebih luas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga melindungi masyarakat sipil serta mendukung proses politik dan pembangunan pascakonflik. Indonesia, sebagai negara anggota PBB, turut berkontribusi aktif melalui pengiriman Kontingen Garuda, melanjutkan tradisi keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia sejak awal kemerdekaan.

Partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB tidak hanya merupakan kewajiban negara untuk memperjuangkan perdamaian global, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian konflik di Kongo. Melalui pengalaman bertempur di luar negeri, TNI dapat meningkatkan kapabilitasnya, yang mungkin berguna dalam mendukung upaya perdamaian di Kongo Timur yang dilanda konflik. Selain itu, kontingen Garuda dapat mempromosikan alutsista buatan dalam negeri dengan menggunakannya dalam misi perdamaian di Kongo, seperti yang terjadi di Lebanon dengan penggunaan panser Anoa. Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah terlibat dalam misi-misi perdamaian di Kongo pada tahun 1960-1961 dan 1963-1964 (Garuda II dan Garuda III), sehingga partisipasi Indonesia dalam misi perdamaian PBB juga memiliki relevansi langsung dengan upaya penyelesaian konflik di Kongo.

Di tengah komitmen tersebut, Indonesia pada dasarnya tidak melupakan partisipasi prajurit perempuan dalam pasukan perdamaian. Dengan hadirnya Indonesia beserta negara-negara anggota PBB lainnya, seharusnya perdamaian di RD Kongo terwujud. Salah satu permasalahannya adalah permasalahan pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah ini diakari dari Pemerintah Republik Demokratik Kongo lebih mementingkan kepentingan jangka pendeknya daripada kesejahteraan rakyat Kongo (Sawyer, 2018).

Kehadiran peacekeepers perempuan tidak hanya meningkatkan efektivitas misi dari segi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak yang terdampak konflik (Huber, 2022). Meski demikian, masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk mengintegrasikan lebih banyak personel perempuan ke dalam misi-misi PBB secara optimal.

Partisipasi perempuan Indonesia dalam misi perdamaian PBB semakin meningkat, sejalan dengan komitmen global untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam operasi perdamaian. Indonesia mulai mengirimkan personel perempuan dalam misi perdamaian PBB sejak tahun 1990-an, terutama dalam peran polisi dan staf sipil. Dalam dekade terakhir, jumlah perempuan Indonesia

yang bertugas dalam misi perdamaian PBB terus meningkat, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap agenda Women, Peace, and Security (WPS).

Namun, kebijakan terkait pemberdayaan prajurit perempuan dalam misi perdamaian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek kebijakan internal TNI maupun implementasinya di lapangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan jumlah prajurit perempuan dalam satuan tugas, kesiapan fisik dan mental, serta hambatan sosial dan budaya di wilayah operasi. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan yang mengatur pemberdayaan prajurit perempuan dalam misi perdamaian menjadi sangat penting untuk menilai efektivitasnya serta mencari solusi atas hambatan yang ada.

Penelitian ini akan difokuskan pada Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda XXXIX-C MONUSCO TA. 2021 – 2022 yang bertujuan untuk mengevaluasi pemberdayaan wanita dalam misi perdamaian PBB. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam meningkatkan peran prajurit perempuan dalam operasi perdamaian dunia. Dengan meninjau permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti akan meneliti terkait “Analisis Pemberdayaan Prajurit Perempuan dalam Misi Perdamaian Dunia (Studi Kasus Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat TNI Kontingen Garuda XXXIX-C MONUSCO TA. 2021 - 2022)”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti mencoba menggunakan metode tersebut untuk menggali dan memahami makna, motivasi, serta mendeskripsikan fenomena dan dinamika yang terjadi pada topik ini. Penelitian kualitatif sejatinya merupakan proses penelitian untuk memahami masalah sosial dengan membuat gambaran yang komprehensif dan kompleks yang ditampilkan dalam teks, pelaporan gambaran rinci yang diperoleh dari suatu sumber informasi dan dilakukan di lingkungan alam (Cresswell, 2016). Lebih lanjut dalam prosesnya penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Sementara itu, dilakukan triangulasi guna memeriksa keabsahan data. Menurut Satori (2013) triangulasi dilakukan dengan tiga model yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik dan triangulasi waktu. Sementara dalam proses analisis data merujuk pada Miles (2014) memandang analisis sebagai tiga aliran aktivitas yang bersamaan antara kondensasi data, tampilan data, dan pengambilan kesimpulan. Penelitian ini sejatinya dilaksanakan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) dengan memilih narasumber berdasarkan posisi dan peran strategis dalam struktur satuan tugas.

PEMBAHASAN

Pemberdayaan Prajurit perempuan dalam Pasukan Perdamaian di Republik Demokratik Kongo

Integrasi perempuan dalam operasi penjaga dan penegakan perdamaian memperoleh legitimasi normatif dan operasional yang kuat melalui agenda *Women, Peace, and Security* (WPS) yang diperkenalkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Agenda ini menempatkan perempuan bukan sekadar sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai aktor strategis dalam pencegahan konflik, pengelolaan keamanan, dan pembangunan perdamaian berkelanjutan. Empat pilar utama WPS—*participation, protection, prevention, serta relief and recovery*—menjadi kerangka kebijakan global yang mendorong transformasi pendekatan operasi pemeliharaan perdamaian dari paradigma keamanan tradisional menuju pendekatan human security yang lebih inklusif.

Pilar *participation* menekankan pentingnya keterlibatan perempuan secara penuh, setara, dan bermakna dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peacemaking, stabilisasi pascakonflik, dan rekonstruksi sosial. Dalam konteks militer, pilar ini menuntut adanya integrasi perempuan ke dalam struktur organisasi, rantai komando, dan fungsi operasional, bukan hanya pada peran administratif atau simbolik. Keterlibatan prajurit perempuan juga memperluas jangkauan interaksi pasukan perdamaian dengan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak yang sering kali terpinggirkan dari proses keamanan formal.

Gambar 1: Partisipasi Prajurit perempuan dalam Pasukan Perdamaian di Republik Demokratik Kongo



Sumber: Dokumentasi Satgas, 2022

Pilar kedua adalah *protection*, khususnya perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik bersenjata. Meskipun perlindungan merupakan salah satu fungsi utama militer, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap perspektif gender. Implementasi pilar ini mencakup pelatihan internal personel militer terkait perlindungan perempuan, penerapan kebijakan *zero tolerance* terhadap *sexual exploitation and abuse*, serta integrasi perspektif gender dalam berbagai proses pendampingan dan bantuan, termasuk *Security Sector Reform* (SSR) dan *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR). Dengan demikian, perlindungan tidak hanya dipahami sebagai respons reaktif, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi struktural pascakonflik.

Lebih lanjut, pilar ketiga adalah *prevention*, terutama dalam konteks pencegahan conflict-related sexual violence. Pencegahan jenis kekerasan ini merupakan persoalan kompleks karena menuntut perubahan perilaku para pelaku. Dalam hal ini, *Female Engagement Teams* (FET) dapat memainkan peran yang signifikan. Upaya pencegahan dapat mencakup berbagai kegiatan yang disesuaikan dengan karakter pelaku dan motif kekerasan. Pencegahan kekerasan seksual sebagai senjata perang menuntut perubahan perhitungan untung-rugi para pelaku melalui penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan sebagai alat penangkal. Dalam situasi konflik aktif, sering kali hanya institusi militer yang memiliki kapasitas koersif yang memadai untuk menciptakan efek jera. Selain itu, pencegahan yang berkelanjutan memerlukan penghapusan impunitas melalui penguatan sistem peradilan serta perubahan nilai-nilai budaya masyarakat. Perlindungan terhadap korban dan saksi juga menjadi bagian integral dari upaya pencegahan, meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya bersifat militer. Dalam konteks ini, institusi militer dapat berperan sebagai teladan, baik melalui perlakuan terhadap perempuan di dalam organisasinya maupun dalam interaksi dengan masyarakat lokal.

Pengalaman operasi penjaga perdamaian PBB, termasuk di MONUSCO, menunjukkan bahwa keterlibatan prajurit perempuan melalui FET meningkatkan efektivitas misi, terutama dalam perlindungan warga sipil dan penanganan isu berbasis gender. Kehadiran perempuan dalam patroli dan pos pemeriksaan sering menciptakan suasana yang lebih tidak konfrontatif, meningkatkan akses informasi, serta mendorong pelaporan kasus sexual and gender-based violence. Selain itu, FET berkontribusi dalam kegiatan pemberdayaan komunitas, dukungan psikososial, dan peningkatan partisipasi perempuan lokal dalam proses perdamaian di tingkat akar rumput.

Namun demikian, Prajurit perempuan menghadapi tantangan multidimensional selama bertugas di Kongo. Hasil wawancara menyoroti budaya patriarkal dan stereotip gender sebagai tantangan utama. Hal ini juga senada dengan Aluoch yang menyatakan peran dan efektivitas FET dalam operasi penjaga perdamaian di Afrika tidak dapat dilepaskan dari pengaruh norma budaya lokal yang kuat dan berlapis.

Dalam banyak masyarakat Afrika yang menjadi lokasi misi PBB, relasi gender masih diatur oleh nilai-nilai patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas utama dalam ranah publik, keamanan, dan pengambilan keputusan. Kondisi ini membentuk lingkungan sosial yang secara struktural membatasi ruang gerak dan otoritas perempuan, termasuk perempuan berseragam yang tergabung dalam misi penjaga perdamaian .

Norma budaya tersebut memengaruhi cara masyarakat lokal memandang personel FET. Di sejumlah konteks, perempuan berseragam dipandang sebagai anomali sosial karena keberadaannya bertentangan dengan konstruksi gender tradisional yang menempatkan perempuan pada ranah domestik. Akibatnya, legitimasi FET sebagai aktor keamanan sering kali dipertanyakan, baik secara terbuka maupun tersirat. Hal ini dapat menghambat kemampuan FET untuk berinteraksi secara efektif dengan pemimpin komunitas laki-laki, tokoh adat, atau struktur kekuasaan lokal yang masih sangat maskulin .

Di sisi lain, norma budaya yang sama justru menciptakan kebutuhan operasional yang khas bagi keberadaan FET. Dalam masyarakat yang membatasi interaksi antara perempuan dan laki-laki asing, personel militer perempuan menjadi satu-satunya saluran yang sah untuk menjangkau perempuan dan anak-anak lokal. Dalam konteks ini, FET berfungsi sebagai penghubung strategis (*strategic liaison*) yang memungkinkan misi penjaga perdamaian memperoleh informasi, membangun kepercayaan, dan memahami dinamika keamanan dari perspektif kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses formal keamanan dan perdamaian .

Akan tetapi, dari sisi kemampuan personal dan profesional, temuan lapangan menunjukkan bahwa prajurit perempuan memperoleh daya (*power*) dalam arti kemampuan menjalankan tugas berisiko, memenuhi tuntutan profesional, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan operasional. Kondisi ini sejalan dengan konsepsi pemberdayaan yang menekankan kemampuan individu khususnya kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber daya produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan serta keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Prajurit perempuan tidak hanya diberi ruang kehadiran, tetapi juga diberi kontrol atas peran dan kontribusinya dalam struktur operasi perdamaian.

Dalam dimensi sosial dan kultural, peran prajurit perempuan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat lokal khususnya perempuan dan anak-anak merepresentasikan pemberdayaan pada tingkat komunitas. Kehadiran mereka membuka ruang aman bagi kelompok rentan untuk menyampaikan pengalaman kekerasan, kebutuhan perlindungan, dan aspirasi sosial. Temuan ini selaras dengan pandangan bahwa pemberdayaan perempuan bersifat relasional dan kolektif, yakni memperkuat perempuan lain melalui interaksi setara, empatik, dan berkelanjutan (Sun, 2019). Dalam konteks ini, prajurit perempuan berfungsi sebagai agen penguatan sosial, bukan sekadar pelaksana mandat keamanan.

Lebih lanjut, motivasi prajurit perempuan yang bersifat multidimensional meliputi aspek profesional, kemanusiaan, institusional, dan personal menunjukkan bahwa pemberdayaan telah menumbuhkan kesadaran identitas dan potensi diri. Para prajurit perempuan memosisikan diri sebagai subjek aktif yang mampu mengambil keputusan secara bebas untuk terlibat dalam misi berisiko tinggi. Hal ini mencerminkan pemahaman pemberdayaan sebagai proses internalisasi kekuatan diri (*inner power*) yang memungkinkan perempuan mengorganisasi pilihan hidup dan perannya secara otonom (Meenakshi, 2004; Sayulu et al., 2005).

Efektivitas Pemberdayaan Prajurit Perempuan dalam Operasi Perdamaian di Kongo tahun 2021 – 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, seluruh informan menegaskan bahwa kehadiran prajurit perempuan telah menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan mandat PBB, khususnya dalam membangun hubungan dengan masyarakat lokal. Kontribusi utama yang paling menonjol adalah kemampuan prajurit perempuan dalam membangun kepercayaan masyarakat, terutama terhadap kelompok perempuan dan anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan dalam konflik bersenjata. Dansatgas

dan Danton WAN TNI menyampaikan bahwa kelompok ini cenderung lebih terbuka dan merasa aman ketika berinteraksi dengan prajurit perempuan, sehingga komunikasi berlangsung lebih efektif dan bermakna.

Dari perspektif operasional, prajurit perempuan berkontribusi signifikan dalam akses informasi sosial dan kemanusiaan. Informasi mengenai kekerasan berbasis gender, eksploitasi seksual, kondisi psikososial korban, hingga dinamika sosial komunitas sering kali hanya dapat diperoleh melalui pendekatan prajurit perempuan. Mantan Kasiops menekankan bahwa informasi semacam ini menjadi dasar penting dalam perencanaan operasi dan perlindungan sipil.

Kehadiran prajurit perempuan melalui *Female Engagement Team (FET)* juga menjadi kontribusi konkret yang diakui oleh seluruh informan. *FET* terbukti berperan dalam kegiatan penyelamatan perempuan mantan milisi, pendampingan korban, serta pemulihan psikologis masyarakat perempuan terdampak konflik. Aktivitas ini memperluas spektrum operasi PBB yang tidak hanya bersifat keamanan, tetapi juga kemanusiaan.

Selain itu, prajurit perempuan aktif dalam kegiatan *CIMIC* yang berorientasi pada penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial. Kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan antara pasukan perdamaian dan masyarakat lokal, sehingga memperkuat legitimasi dan citra pasukan PBB di lapangan. Dalam kegiatan *CIMIC*, prajurit perempuan berperan penting dalam menciptakan interaksi yang lebih inklusif dan minim hambatan budaya. Kemampuan komunikasi interpersonal dan pendekatan humanis membuat masyarakat lebih responsif terhadap program-program PBB, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.

Gambar 2: Prajurit Perempuan Dalam CIMIC



Sumber: Laporan RDB 2021

Pada tugas patroli, keberadaan prajurit perempuan menciptakan rasa aman bagi perempuan dan anak-anak. Warga yang sebelumnya enggan melapor kepada prajurit laki-laki menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait ancaman keamanan atau tindak kekerasan di lingkungan mereka. Sementara itu, dalam konteks perlindungan sipil, prajurit perempuan memiliki keunggulan dalam menangani isu sensitif seperti kekerasan seksual dan anak-anak rentan. Kehadiran mereka memungkinkan penanganan kasus dilakukan secara lebih aman, manusiawi, dan efektif.

Keterlibatan aktif dalam *FET* dan *CIMIC* juga menjadi indikator konkret. Keberhasilan program-program ini menunjukkan efektivitas pendekatan berbasis sensitivitas sosial. Peningkatan pelaporan kasus

kekerasan berbasis gender dipandang sebagai indikator positif, karena menunjukkan meningkatnya rasa aman korban untuk bersuara. Selain itu, kinerja operasional seperti disiplin, kepatuhan SOP, dan kepemimpinan juga menjadi indikator penilaian PBB.

Pengalaman prajurit perempuan dalam operasi perdamaian menunjukkan bahwa pendekatan empatik dan inklusif yang mereka terapkan di lapangan tidak muncul secara alamiah semata, melainkan merupakan hasil dari proses pelatihan yang membentuk sikap, keterampilan, dan perilaku kerja. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pelatihan merupakan proses sistematis untuk mengubah tingkah laku individu agar mampu melaksanakan tugas secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam konteks misi perdamaian, perubahan perilaku tersebut tercermin dalam kemampuan prajurit perempuan membangun kepercayaan, membuka akses sosial, serta memperoleh informasi strategis yang memperkaya pemahaman dinamika konflik.

Pelatihan berbasis sensitivitas budaya dan perlindungan terhadap risiko kekerasan seksual yang dinilai krusial oleh para informan mencerminkan kesesuaian antara materi pelatihan dan kebutuhan pekerjaan aktual. Teori pelatihan menekankan bahwa materi harus relevan dengan tujuan organisasi dan tuntutan tugas agar mampu meningkatkan kemampuan kerja secara langsung. Dalam misi perdamaian, materi seperti gender, komunikasi lintas budaya, dan perlindungan sipil terbukti menjadi kompetensi kunci yang memungkinkan prajurit perempuan menjalankan peran mereka secara optimal dalam *FET* dan *CIMIC*.

Peran prajurit perempuan dalam *FET* dan *CIMIC* juga dapat dipahami sebagai hasil dari metode pelatihan yang menekankan praktik dan pengalaman langsung. Teori pelatihan menjelaskan bahwa metode berbasis praktik—baik melalui simulasi, studi kasus, maupun pelatihan lapangan—lebih efektif dalam membangun keterampilan interpersonal dan pengambilan keputusan. Hal ini menjelaskan mengapa prajurit perempuan mampu mengaplikasikan hasil pelatihan secara nyata di lapangan, terutama dalam interaksi dengan kelompok rentan dan korban kekerasan.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa efektivitas prajurit perempuan sangat dipengaruhi oleh dukungan struktural organisasi, seperti fasilitas kesehatan, akomodasi yang aman, dan lingkungan kerja yang responsif. Dalam teori pelatihan, lingkungan pendukung merupakan prasyarat agar hasil pelatihan dapat terinternalisasi dan berdampak nyata pada kinerja. Pelatihan tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas teknis, tetapi menjadi bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan mutu kerja, moral, serta keselamatan personel. Dengan demikian, dukungan struktural yang dialami prajurit perempuan memperkuat efektivitas pelatihan yang telah mereka terima sebelum penugasan.

Secara keseluruhan, sintesis ini menunjukkan bahwa pengalaman prajurit perempuan dalam misi perdamaian merupakan bukti empiris bahwa pelatihan yang tepat, relevan, dan berkelanjutan mampu meningkatkan kemampuan, kesiapan, dan kualitas kinerja personel. Pelatihan tidak hanya membekali prajurit perempuan dengan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk sikap empatik, kepekaan sosial, dan profesionalisme yang menjadi kunci keberhasilan operasi perdamaian PBB. Dengan demikian, temuan lapangan memperkuat teori bahwa pelatihan merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas organisasi dan pencapaian tujuan misi.

Dengan melihat hal-hal di atas, peneliti melihat bahwa pemberdayaan prajurit perempuan mencerminkan proses optimalisasi sumber daya manusia, yaitu upaya sistematis untuk mencapai efektivitas tertinggi dari sumber daya yang tersedia (Sidik, 2002). Tujuan optimalisasi diarahkan pada maksimasi pencapaian mandat PBB dan minimasi hambatan sosial serta risiko keamanan di wilayah konflik (Siringoringo, 2005).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan prajurit perempuan dalam operasi perdamaian PBB di Kongo pada periode 2021–2024 memiliki peran strategis dan relevansi yang semakin signifikan dalam mendukung efektivitas misi perdamaian. Agenda global Women, Peace, and

Security yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendorong perubahan paradigma operasi pemeliharaan perdamaian dari pendekatan yang cenderung maskulin menuju pendekatan yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, kehadiran prajurit perempuan tidak lagi diposisikan sebagai elemen pelengkap, melainkan sebagai bagian integral dari strategi operasional misi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa prajurit perempuan TNI yang tergabung dalam Satgas BGC Konga XXXIX-C MONUSCO berperan aktif dalam berbagai kegiatan operasional maupun sosial, khususnya dalam membangun interaksi yang efektif dengan masyarakat lokal. Keterlibatan mereka terbukti meningkatkan kualitas pendekatan terhadap kelompok perempuan dan anak-anak, memperluas akses informasi, serta memperkuat kepercayaan dan legitimasi pasukan perdamaian di mata masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan prajurit perempuan memberikan nilai tambah nyata terhadap capaian misi perdamaian, terutama dalam aspek perlindungan kelompok rentan dan hubungan sipil-militer.

Dari perspektif pemberdayaan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas peran prajurit perempuan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah atau representasi kehadiran, melainkan oleh sejauh mana mereka memperoleh ruang, kepercayaan, dan dukungan struktural untuk menjalankan tugas secara optimal. Faktor-faktor seperti kualitas pelatihan, penugasan yang proporsional, perlindungan keamanan, serta dukungan kebijakan internal TNI menjadi determinan utama keberhasilan pemberdayaan tersebut. Ketika pemberdayaan dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, kontribusi prajurit perempuan terhadap keberhasilan misi meningkat secara signifikan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa proses pemberdayaan prajurit perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik pada tataran kebijakan maupun implementasi di lapangan. Keterbatasan jumlah personel perempuan, hambatan budaya di wilayah operasi, risiko keamanan, serta kesiapan fisik dan psikologis menjadi isu yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan. Tantangan ini menegaskan bahwa pemberdayaan prajurit perempuan merupakan proses dinamis yang membutuhkan evaluasi serta penyesuaian kebijakan secara konsisten.

REFERENSI

- Atack, I. (2005). *The Ethics of Peace and War*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Cresswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4 ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hobbes, T. (2002). *Leviathan*. New York: Simon & Schuster.
- Huber, L. (2022, Mei). *The Impact of Women Peacekeepers on Public Support for Peacekeeping in Troop-Contributing Countries*. Diambil kembali dari International Peace Institute: https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2022/05/IPI-E-RPT-Impact_of_Women_Peacekeepersweb.pdf
- Sayulu, G. S., & “, B. S. (2005). Impact of Self-Help Groups on Women Empowerment An Empirical Study. *Management Research*, 11(3 & 4).
- Meenakshi, M. (2004). *Empowerment of Women*. Delhi: Isha Books.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications.
- Satori, Djam'an dan Komariah Aan, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sawyer, I. (2018, April 13). *The Congolese Government is at war with its people*. Diambil kembali dari Open Democracy: https://www.opendemocracy-net.translate.google/en/congolese-government-is-at-war-with-its-people/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Keuangan Daerah. *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 2 Februari 2026

- Silitonga, T. B. (2020). *Perancangan dan Penulisan Karya Ilmiah: Proposal Penelitian, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Siringoringo, H. (2005). *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sun, P. Y., & Anderson, M. H. (2019). Organizational Goals and Effectiveness Measurement: A Contemporary Review. *International Journal of Management Reviews*, 21(3). doi:<https://doi.org/10.1111/ijmr.12195>